

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan umum merupakan sebuah wadah bagi partai politik dan elit politik yang bertindak sebagai alat perwakilan rakyat dan sarana untuk pergantian pemerintahan. Jadi, dengan adanya pemilihan umum, maka, pergantian pemerintahan dapat dilaksanakan secara demokratis.

Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2004 kemarin dilaksanakan sebanyak tiga kali. Pemilihan umum yang pertama dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pemilihan umum yang kedua dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004, dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pemilihan umum yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004, merupakan Pemilihan Presiden tahap ke II. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dua kali karena pada pemilu pertama belum ada seorang calon yang memperoleh suara diatas 50 persen. Pemilihan Presiden 2004 di Indonesia, merupakan Pemilihan Presiden secara langsung yang pertama kali di Indonesia. Jadi hal itu merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena dalam pemilu tersebut rakyat Indonesia akan menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia lima tahun mendatang.

Pemilu tahun 2004 di Indonesia terselenggara bukan hanya atas kerja keras bangsa Indonesia, melainkan juga karena adanya bantuan dari berbagai lembaga internasional, baik secara institusi maupun individu.

Amerika sebagai negara yang mengkampanyekan demokrasi keseluruhan dunia turut berpartisipasi dalam menyukseskan terselenggaranya pemilu 2004 di Indonesia.

Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh apa saja pengaruh dunia internasional terhadap pemilu tahun 2004 di Indonesia, khususnya pengaruh Amerika Serikat.

B. Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa pengaruh Amerika Serikat terhadap Pemilu tahun 2004 di Indonesia,
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
3. Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang telah penulis pelajari selama di bangku kuliah,
4. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang telah penulis pelajari selama kuliah, khususnya teori yang berkenaan dengan pembuktian hipotesa dan menjawab permasalahan yang penulis angkat.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara baru dalam hal demokrasi. Sebelumnya selama kurang lebih 32 tahun Indonesia dikuasai oleh rezim otoriter yang militerisme, karena kebetulan pemimpin Indonesia waktu itu adalah seorang Jenderal.

Perubahan Indonesia menuju negara yang demokratis dimulai dengan lengsernya Soeharto pada bulan Mei 1998. Sejak saat itu, sistem politik di Indonesia pun berubah secara drastis. Partai-partai baru bermunculan sampai pada pemilu 1999 partai yang ikut pemilu mencapai 48 partai, dari yang sebelumnya hanya 3 partai. Dan pada pemilu 2004 di Indonesia partai politik yang ikut pemilu menurun jumlahnya menjadi 24 partai. Ini dikarenakan Indonesia menganut sistem multi-partai.

Setelah lengsernya Soeharto belum ada presiden baru yang mampu bertahan lama. Dengan adanya Pemilihan Presiden langsung ini, akan sulit untuk menjatuhkan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi Presiden Indonesia yang baru ini akan mendapat mandat yang kuat dari rakyat dan susah untuk dilengserkan, karena legalitas pemilihan secara langsung sangat tinggi.

Amerika Serikat adalah negara yang terkuat di dunia saat ini. Dalam suksesi beberapa negara di dunia ini, Amerika ikut berperan di dalamnya. Kita lihat saja Afganistan dan Irak, itu adalah contoh dari keterlibatan Amerika yang bisa kita lihat dengan jelas. Karena sudah jelas Amerika yang men-*setting* suksesi di negara tersebut. Namun demikian ada juga keterlibatan Amerika dalam beberapa suksesi di beberapa negara yang tidak begitu kelihatan, karena memang sengaja dibuat agar tidak kelihatan.

Amerika Serikat sering membanggakan diri sebagai *The Champion of Democracy and The Guardian of Democracy*. Dengan kebanggaan tersebut, Amerika Serikat selalu mendengungkan tekadnya untuk menegakkan pelaksanaan demokrasi di seluruh dunia.

Demokrasi dan menghargai hak-hak azasi manusia sudah sejak lama menjadi komponen utama dari politik luar negeri Amerika Serikat. Menegakkan demokrasi tidak hanya mempromosikan nilai-nilai fundamental Amerika, seperti kebebasan beragama dan hak-hak para buruh, tetapi juga membantu menciptakan arena global yang lebih aman, stabil, dan sejahtera yang mana Amerika Serikat bisa mengembangkan kepentingan nasionalnya. Sebagai tambahan, demokrasi adalah kepentingan nasional suatu negara yang membantu mengamankan yang lain. Negara yang diperintah secara demokratis seperti ini ingin menjaga perdamaian, mencegah agresi, mengembangkan pasar terbuka, mempromosikan perkembangan ekonomi, melindungi warga negaranya, memerangi kejahatan dan terorisme internasional, menegakkan hak-hak azasi manusia, menghindari krisis kemanusiaan dan pengungsi, memperbaiki lingkungan global, dan melindungi kesehatan umat manusia.¹

Dengan tujuan ini, Amerika Serikat berusaha untuk:

1. Mempromosikan demokrasi untuk memperoleh keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan bagi seluruh dunia;
2. Membantu negara yang baru berdemokrasi dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi;

¹ Dalam artikel "Democracy" pada website <http://www.state.gov/g/drl/democ/> diakses tanggal 15 April 2006.

3. Membantu advokat demokrasi di seluruh dunia untuk mendirikan demokrasi dengan bersemangat di negaranya sendiri; dan
4. Mengidentifikasi dan menuduh rejim yang melarang warganya untuk memilih pemimpinnya dalam pemilihan yang bebas, adil, dan transparan.²

The Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (DRL) atau Biro Demokrasi, Hak Azasi Manusia, dan Tenaga Kerja berkomitmen untuk mendukung dan mempromosikan program demokrasi ke seluruh dunia.³

Lebih dari seperempat abad yang lalu, banyak negara telah berhasil melakukan transisi menuju demokrasi. Dan banyak yang sedang dalam proses transisi menuju demokrasi. Ketika sejarawan menulis tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada akhir abad 20, mereka akan mengidentifikasi dari 30 negara di tahun 1974 menjadi 117 sekarang, sebagai salah satu warisan terbesar Amerika Serikat. Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mengembangkan warisan ini sampai semua penduduk dunia memiliki hak yang fundamental, yaitu untuk memilih pemimpin mereka melalui suatu proses sipil yang berkelanjutan termasuk pemilihan yang bebas, adil, dan transparan.⁴

Menyebarkan demokrasi dan menjaga hak-hak azasi manusia adalah inti dari konsep Amerika tentang dirinya sebagai sebuah negara. Deklarasi kemerdekaan Amerika menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka diberkati oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

dapat dicabut, yang antaranya adalah hak untuk hidup, kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan.⁵

Presiden Woodrow Wilson adalah salah satu dari Presiden Amerika yang mengartikulasikan peranan demokrasi dan hak-hak azasi manusia dalam politik luar negeri Amerika Serikat, ketika dia mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat memasuki Perang Dunia I "*To make the world safe for democracy*".⁶

Dalam Perang Dunia II Amerika Serikat berperan aktif dalam mengembangkan demokrasi di dua negara yang kalah, yakni Jepang dan Jerman.

Membantu negara lain mengembangkan institusi yang demokratis dan mempromosikan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia sudah menjadi tujuan politik luar negeri Amerika Serikat yang penting. Idealisme Amerika keyakinan yang kuat bahwa demokrasi dan hak-hak azasi manusia adalah warisan dari semua manusia.

Ada alasan lain mengapa AS mendukung demokrasi, alasan itu adalah:

1. Negara yang demokratis adalah tetangga yang baik; kemungkinan mereka untuk berperang satu sama lain lebih kecil dibandingkan dengan negara yang tidak demokratis.
2. Negara demokrasi yang stabil tidak menghasilkan pengungsi dan krisis kemanusiaan dan tuntutan pada masyarakat internasional.

⁵ Dalam artikel "*Democracy, Human Rights and US Policy Toward Indonesia*" pada website <http://www.usembassyjakarta.org/Ambspeech.html> diakses tanggal 15 April 2006.

⁶ *Ibid.*

3. Negara dengan pemerintahan yang totalitarian atau autoritarian mungkin stabil dalam jangka pendek, sedangkan negara yang demokratis akan stabil untuk jangka waktu yang lama.
4. Pemerintahan yang baik dan sistem yang transparan dan adil mendorong investasi yang bertanggung jawab, yang mana penting bagi pertumbuhan ekonomi.
5. Demokrasi dan rasa hormat terhadap hak-hak azasi manusia tetap merupakan cara terbaik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.⁷

Amerika Serikat bekerjasama dengan pemerintah, non-governmental organizations (NGOs), dan individu-individu di seluruh dunia dalam membantu mereka memperkuat rasa hormat mereka terhadap sistem yang demokratis di Rusia dan negara lain bekas Uni Soviet, di Eropa Timur, di Afrika Selatan dan negara Afrika yang lain, di Amerika Latin, dan di Asia Timur.⁸

Amerika percaya bahwa ada karakteristik dasar tertentu dari demokrasi, termasuk kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan yang bebas dan adil, perlindungan dasar hak-hak azasi manusia, termasuk kebebasan untuk berekspresi, dan kepastian hukum, Amerika juga mengakui bahwa semua demokrasi berbeda. Setiap negara harus membentuk demokrasinya untuk menyesuaikan kebutuhannya sendiri yang unik. Amerika akan bekerjasama dengan warga negara dan pemerintah dari negara lain, bukan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

untuk memaksakan demokrasi Amerika, tetapi untuk membantu mereka meraih aspirasi demokrasi mereka.⁹

Di dalam *Dictionary of the Social Science* karangan Craig Calhoun disebutkan bahwa “*democratization is the transition from undemocratic regimes to democratic regimes, or, more generally, the expansion of access to decision making and power within societies, organizations, or associations. Democratization is one of the major features of western modernity, first in the transition to popular, democratic forms of rule and then in the extension of the franchise and related forms of social empowerment to excluded groups, principally women and racial and ethnic minorities.*”¹⁰

Jadi demokratisasi disini diartikan sebagai sebuah transisi dari suatu regime yang tidak demokratis menuju regime yang demokratis, atau ekspansi dari akses menuju pembuatan keputusan dan kekuasaan dalam masyarakat, organisasi atau asosiasi.

Indonesia adalah sebuah negara yang sedang mengalami demokratisasi. Berjalan dari satu regime yang sebelumnya tidak demokratis, menuju satu regime yang demokratis.

Amerika Serikat sebagai negara yang mengkampanyekan demokrasi keseluruh dunia hadir dalam pemilu 2004 di Indonesia untuk membantu Indonesia menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Supaya Indonesia menjadi negara yang demokratis, lepas dari regime yang otoriter.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Craig Calhoun, *Dictionary of the Social Sciences*, New York, Oxford University Press, 2002, hal. 113.

Amerika Serikat turut hadir dalam pemilu Indonesia 2004 melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta dan para pemantaunya yang ditempatkan di beberapa propinsi di Indonesia serta hadirnya Jimmy Carter dan The Carter Center untuk memantau pemilu tahun 2004 di Indonesia. Selain itu ada juga LSM dari Amerika Serikat, yaitu *National Democratic Institute* (NDI) yang melakukan pemantauan pemilu dan polling-polling pada saat menjelang pemilu berlangsung.¹¹

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaannya adalah “Apa pengaruh bantuan Amerika Serikat Terhadap Pemilihan Umum 2004 di Indonesia?”

E. Kerangka Dasar Teori

Untuk dapat memahami dan menganalisa permasalahan diatas kita memerlukan kerangka berpikir. Didalam menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan Teori Politik Luar Negeri.

Pembahasan mengenai politik luar negeri senantiasa dimulai dari kepentingan nasional suatu negara yang melaksanakannya. Dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus didasarkan pada konsep Kepentingan Nasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Dari artikel “Masukkan Surat Suara” pada website <http://www.suarapembaruan.com/News/2004/04/05/Utama/ut01.htm> diakses tanggal 24 Agustus 2006.

“Politik luar negeri merupakan sebuah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.”¹²

Dari definisi diatas bisa diartikan bahwa politik luar negeri adalah strategi atau arah tindakan terencana yang dikembangkan oleh pembuat kebijakan suatu negara terhadap negara lain atau lembaga internasional yang ditujukan untuk mencapai tujuan khusus yang didefinisikan dalam istilah Kepentingan Nasional. Disini terdapat beberapa unsur utama dalam politik luar negeri, yaitu: strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal dan tujuan atau kepentingan nasional suatu negara.

Menurut Robert Jervis seorang kepala negara dalam menentukan kebijakan luar negeri sering melakukan mispersepsi. Pertama, pembuat keputusan politik luar negeri sering kali kurang memperhitungkan kemungkinan bahwa pesan, pidato, atau komunikasi lain yang mereka sampaikan diterima dengan tidak jelas oleh orang lain (walaupun mungkin sudah diusahakan se jelas mungkin). Kedua, para pembuat keputusan itu sering kali tidak menyadari bahwa perilaku mereka mungkin tidak menunjukkan apa yang sebetulnya mereka komunikasikan. Mereka berasumsi bahwa pihak lain akan mengerti makna tindakan dan perilaku mereka dengan mudah.¹³

¹² Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Putra A Bardin, 1999, hal. 5.

¹³ Mohtar Mas'oed, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisis*, Yogyakarta, PAU-SS UGM, 1989, hal. 24.

Pelaksanaan politik luar negeri oleh suatu negara adalah suatu petunjuk yang menegaskan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Dengan melaksanakan politik luar negerinya, maka suatu negara menduduki diri dalam pergaulan antar bangsa dan sekaligus menentukan sikap, posisi, dan perannya dalam dinamika pergaulan internasional.

Karena situasi internasional itu tidak statis melainkan sarat dengan berbagai pola dan kecenderungan perkembangan, maka kebijaksanaan yang dijadikan landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri selalu memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap dinamika tersebut.

Dalam kasus ini kita akan lebih memfokuskan perhatian pada pembahasan poin para pengambil keputusan yang berada di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Sebagai Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush mempunyai hak dan kapasitas yang besar dalam proses penentuan kebijakan luar negeri negara tersebut.

Meneliti politik luar negeri dari sudut pandang pembuat keputusan berarti menempatkan suatu keputusan politik luar negeri tertentu atau serangkaian keputusan politik luar negeri sebagai sasaran analisa. Output kebijakan politik luar negeri biasanya merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu tindakan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan, sikap atau tindakan ke negara lain, dalam kasus ini oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Dalam pemilu 2004 di Indonesia, Amerika menjadi salah satu aktor yang turut berperan dalam menyukseskan pemilu tersebut. Amerika adalah negara

demokrasi yang ingin mendemokrasikan semua negara di dunia ini. Dengan ikut berperan dalam pemilu 2004 di Indonesia, berarti Amerika turut mendemokrasikan Indonesia. Sebagaimana tujuan Amerika Serikat di Indonesia, yaitu mewujudkan suatu Indonesia yang damai, stabil, demokratis, bersatu dan sejahtera.¹⁴

Demokratisasi adalah sebuah tansisi dari rejim yang tidak demokratis ke rejim yang demokratis, atau, lebih umumnya, ekspansi akses ke pembuatan keputusan dan kekuasaan dalam masyarakat, organisasi, atau asosiasi. Sedangkan demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, pada umumnya di level negara, tetapi juga termasuk pemerintahan dan pembuatan keputusan skala kecil.¹⁵

Sejak Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis ideologi demokrasi telah bersaing ketat dengan sistem politik lainnya; di antaranya Monarkhi dan hak sakral para raja, Aristokrasi dan Oligarkhi, Fascisme dan keyakinan terhadap kekuasaan absolut negara, serta komunisme dan keyakinan revolusionernya yang bersifat dogmatis. Walau kerap ditampik setelah dicoba untuk diterapkan oleh masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip demokrasi, mengabaikan prinsip kebebasan, menerapkan jalan pemecahan masalah dengan cepat dan mudah meski mengabaikan asas mayoritas serta para intelektual dan massa rakyat. Doktrin demokrasi berkembang sangat baik pada masyarakat Atlantik, di negara persemakmuran berbahasa Inggris, dan di lingkungan Eropa Barat yang memelihara doktrin ini melalui nilai-nilai yang berakar pada budaya Yunani-

¹⁴ Dalam artikel "US Democracy and american Foreign Policy" pada website http://www.usembassyjakarta.org/Ambremarks_ppia.html diakses tanggal 15 April 2006.

¹⁵ Craig Calhoun, *Dictionary of the Social Sciences*, New York, Oxford University Press, 2002, hal. 113.

Romawi dan Yudea-Kristen dan memantapkannya selama hampir dua abad melalui pengembangan teori yang bersifat spekulatif dan upaya pragmatis. Pertumbuhan yang efektif di kawasan tersebut bisa juga terpaut dengan kondisi khusus seperti tingkat kepadatan sosial serta konsensus terhadap nilai dasar, basis ekonomi yang stabil, dan masyarakat yang terpelajar serta bertanggung jawab. Pada jaman kontemporer sekarang ini, persaingan ideologi yang utama adalah mengenai konsep masyarakat demokratis (dalam artian Barat) dengan demokrasi seperti yang dikemukakan oleh teori komunis. Wahana bagi persahabatan tersebut berlangsung di hampir seratus dua puluh negara dunia ketiga yang banyak diantaranya baru terlepas dari genggaman penjajahan selama seabad atau lebih.¹⁶

F. Hipotesa

Dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, serta dengan menggunakan pemikiran yang teoritis yang dipakai, yaitu teori politik luar negeri, maka penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut: Amerika Serikat mempengaruhi proses pemilihan umum tahun 2004 di Indonesia. Pengaruhnya adalah memperlancar proses pemilihan umum 2004 dan memperkuat legitimasi pemilihan umum tersebut di dunia internasional.

¹⁶ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Putra A Bardin, 1999, hal. 55.

G. Metode Penulisan

Dalam hal pencarian data, penulis menggunakan data sekunder dengan cara *Library Research* berupa buku-buku ilmiah, jurnal, makalah, bulletin, surat kabar, majalah dan media-media lainnya yang relevan dengan obyek penelitian.

H. Jangkauan Penulisan

Penulis akan memfokuskan penelitian pada pengaruh Amerika dalam pemilihan 1999 - 2004 di Indonesia. Pembahasan akan dimulai dari keikutsertaan Amerika Serikat dalam pemilihan sampai selesainya pemilihan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan apabila penulis akan menjelaskan masalah diluar batasan tersebut untuk memperkuat penulisan, dan dapat dijadikan data pendukung penulisan, yang tentu saja data-data itu adalah data-data yang relevan dengan masalah ini.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, berisikan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penulisan, jangkauan penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini diceritakan tentang kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, yang meliputi, sejarah politik luar negeri Amerika Serikat dan demokrasi dalam politik luar negeri Amerika Serikat.

BAB III : Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Sistem Pemilu di Indonesia, dimulai dari Sistem Pemilihan Presiden, Pemilu Legislatif dan tanggapan masyarakat terhadap Sistem Pemilihan yang baru.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kebijakan Amerika Serikat dalam pemilu tahun 2004 di Indonesia dan apa saja pengaruhnya terhadap pemilu 2004 di Indonesia.

BAB V : Bab ini berisikan kesimpulan dari semua bab diatas.